



Partisipasi Masyarakat Desa Kutapohaci Dalam Pembangunan Desa

Mega Fitria Lesmana¹, Evi Priyanti

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 5 November 2023

Revised: 19 November 2023

Accepted: 29 November 2023

Infrastructure development is a physical development process as a manifestation of the ideals of the state to create a prosperous and prosperous society evenly distributed in the territory of Indonesia, however, the infrastructure development which is the basis for the realization of a prosperous and prosperous society has not been obtained by the community if the cause is still apathetic towards society. development. Community participation is a form of participation to support a program in various ways. Through a participatory approach, community participation is not only limited to physical participation, but community involvement in contributing ideas and solving problems.

Based on Law Number 6 of 2014 Article 78 concerning villages, it is expressly stated that village development aims to improve the welfare of rural communities and the quality of human life as well as poverty alleviation through meeting basic needs, developing village infrastructure and facilities, developing local economic potential, and utilizing natural resources. natural resources and the environment in a sustainable manner. However, the reality is that rural infrastructure development is contrary to the objectives of the applied law. The quality of development services in facilities and infrastructure cannot be felt by the community as a whole.

Keywords: *infrastructure development, community participation*

(*) Corresponding Author: nidatahaanii07@gmail.com, waluyoawal7@gmail.com

How to Cite: Lesmana, M., & Priyanti, E. (2023). Partisipasi Masyarakat Desa Kutapohaci Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 499-503. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5681>

PENDAHULUAN

Proses demokratisasi Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengannya, seperti program penanggulangan kemiskinan. Menurut Todaro (2000: 18), yang dikutip dalam contoh ini, kemajuan dalam situasi ini pada akhirnya harus melampaui aspek material dan finansial kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembangunan paling baik dipahami sebagai proses multifaset yang melibatkan tantangan untuk merencanakan dan mengevaluasi keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Pendekatan partisipatif untuk pembangunan infrastruktur melibatkan keterlibatan gagasan masyarakat, tenaga mereka, pengetahuan mereka, aset mereka, dan uang mereka.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang tujuan pembangunan desa, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang aturan pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain menyebutkan bahwa: 1. Pembangunan desa mengutamakan kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. 2. Masyarakat desa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. 3. Pemerintah desa diharapkan dapat mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang dihadiri oleh

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa (RPJM desa dan RKP-Desa). 4. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan menggunakan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, serta melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Hak untuk mengetahui rencana pembangunan desa dan pelaksanaannya dijamin bagi masyarakat desa pada butir nomor lima. 6. Masyarakat desa berhak mengawasi jalannya pembangunan desa. Artinya, untuk memaksimalkan peran masyarakat desa sebagai penggerak pembangunan daerah dan nasional, pembangunan desa partisipatif perlu mendapat perhatian semua kalangan.

Di era Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peran masyarakat sangat strategis dalam mendorong dan menghidupkan kembali pemerintahan yang demokratis melalui upaya kolaboratif lintas sektor dan pemangku kepentingan guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang dapat mengakibatkan bencana ekonomi, sosial, dan ekologi di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah memberikan gambaran dan kejadian yang sebenarnya terjadi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Dusun Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti berdasarkan fenomena yang muncul pada objek penelitian selama penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

Menurut definisi masyarakat yang diberikan di atas, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain, yang memiliki infrastruktur untuk mendukung kegiatan tersebut, dan yang berkewajiban untuk bekerja menuju tujuan bersama. Bintoro Tjokoromidjojo mengklarifikasikan hal-hal berikut terkait keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat:

- a. Keikutsertaan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti dalam proses putusan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
- b. Tanggung jawab dan keikutsertaan dalam pelaksanaan usaha pembangunan. Ini menjadi faktor pendukung dalam kegiatan produktif yang direncanakan dengan serius, mobilisasi sosial dengan latar belakang pembangunan, dan usaha serupa lainnya.
- c. Pembangunan direncanakan secara adil dengan cara memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan pembinaan yang diberikan, wilayah tertentu yang relevan atau golongan dari masyarakat sasaran dapat ditingkatkan keterlibatannya secara aktif.

Kita dapat melihat bahwa setiap isu global yang berkaitan dengan pembangunan atau isu-isu lainnya, serta rencana pembangunan di Desa Kutapohaci, harus didiskusikan sebelum membuat pilihan untuk memastikan bahwa rencana tersebut dilaksanakan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu tindakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa untuk terselenggaranya pembangunan desa yang sukses yang dilakukan dengan cara

sengaja agar sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peruntukannya.

Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kajian tentang pengertian “partisipasi” pada dasarnya dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi secara aktif, sukarela dalam keseluruhan proses kegiatan yang terlibat, yang meliputi kesimpulan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pendapat), serta penjelasan hasil kegiatan yang dilaksanakan. Jenis tindakan yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam prakarsa pembangunan, seperti mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, melaksanakan tugas, memantau kemajuan mereka, dan menggunakan hasil upaya mereka.

Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam segala aspek pembangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan daerah. Terwujudnya kemampuan dan keinginan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan dikenal dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan (pedesaan). Dengan bantuan masyarakat, perencanaan pembangunan bertujuan lebih tepat sasaran, artinya program atau rencana yang dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Prioritas ditetapkan saat membuat program pengembangan (diurutkan menurut tingkat kepentingan), memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pembagian dan pengalokasian faktor-faktor produksi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya apabila program-program pembangunan dibuat secara terarah dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Setiap program pengembangan masyarakat, termasuk penggunaan sumber daya lokal dan alokasi anggaran, umumnya diputuskan oleh pemerintah pusat, yang seringkali lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok kecil elit penguasa dan bukan keinginan dan kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui pembentukan forum yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang inisiatif pembangunan di daerah setempat atau di tingkat lokal.

Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Keterlibatan banyak orang—yang biasanya lebih miskin—untuk secara sukarela menyumbangkan waktu dan energi mereka untuk upaya pembangunan sering dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Lapisan di atasnya, yang biasanya terdiri dari orang-orang kaya, lebih sering mendapat manfaat dari hasil pembangunan, dan tidak berkewajiban untuk memberikan kontribusi yang sebanding. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan harus dipahami sebagai pemerataan kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, dan/atau berbagai bentuk pengorbanan lainnya yang sebanding dengan keuntungan yang akan diterima oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Keterlibatan masyarakat dalam memelihara inisiatif pembangunan masyarakat yang telah selesai secara efektif adalah hal lain yang sering diabaikan ketika pembangunan dilaksanakan. Agar capaian pembangunan dapat dipertahankan dan dinikmati tanpa batas waktu (tanpa menurunkan kualitasnya), perlu direncanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Evaluasi program dan proyek pembangunan sangat membutuhkan tindakan pemantauan. Hal ini tidak hanya diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai sesuai rencana, tetapi juga penting untuk mendapatkan masukan tentang setiap masalah atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam situasi ini, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana kegiatan berkembang dan bagaimana perilaku aparatur pembangunan.

Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Komponen yang paling signifikan dan sering diabaikan adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Hal ini disebabkan karena tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Selain itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan mendorong masyarakat untuk secara konsisten berpartisipasi dalam setiap program pembangunan ke depan. Salah satu tujuan pembangunan desa yang dilaksanakan harus sejalan dengan tantangan yang dihadapi, potensi yang ada, keinginan masyarakat, dan tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil, tujuan keseluruhan yang diharapkan dapat dicapai adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis sumber daya pertanian yang didukung oleh kegiatan sektor nonpertanian.

Keterlibatan masyarakat atau disebut juga dengan partisipasi dalam pembangunan (pedesaan) adalah aktualisasi komitmen masyarakat terhadap, kesiapan berkorban, dan kontribusi terhadap pelaksanaan prakarsa lokal. Bentuk pelibatan masyarakat antara lain kerelaan mereka untuk menyerahkan tanah atau lahan yang dilewati pembangunan jalan desa atau jaringan irigasi, tanpa meminta pembayaran ganti rugi atas harga tanah atau tanah, bekerja sama dalam pembangunan jalan desa (tanpa dibayar), dan lain-lain.

Faktor Penghambat Dalam Pembangunan yaitu:

- a. Ada dua perspektif, positif dan negatif tentang partisipasi perencanaan. Sisi positifnya, keterlibatan meningkatkan keterlibatan emosional dalam rencana pembangunan desa yang disusun bersama. Kemungkinan ketidaksepakatan yang tak terhindarkan di antara kelompok sosial, yang dapat menghambat atau bahkan menunda adopsi pilihan konsensus, adalah hal yang negatif.
- b. Keterbatasan pembiayaan atau keuangan yang masih kurang memadai untuk membuat kemajuan bagi masyarakat desa, khususnya dalam pemberian pelayanan untuk kemajuan tersebut.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan berdasarkan temuan penelitian tentang pembangunan desa dan keterlibatan masyarakat:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pembangunan Desa Kutapohaci masih terhitung rendah, terbukti dengan kurangnya antusias masyarakat untuk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan, rendahnya partisipasi dalam berbagi ide dan gagasan untuk pelaksanaan, kurangnya partisipasi dalam bentuk sumbangan barang atau peralatan, dan rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, namun masyarakat masih belum sepenuhnya berpartisipasi.

2. Berdasarkan temuan penelitian tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, maka pemerintah desa telah mengambil langkah dan peran, seperti mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan, dan sasaran dari setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

REFERENSI

Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>
<https://diklat.semarangkota.go.id/post/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-ir-enny-karnawati-msi> <https://www.lpwntb.or.id/urgensi-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-daerah/>